

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Barlingmascakeb)

Tri Nurindahyanti Yulian

Abstract

The implementation of regional autonomy in all regencies in Indonesia was marked by the enactment of the Act (the Act) relating to regional autonomy: Law No. 22 of 1999 on Regional Government. With the implementation of regional autonomy, there are two aspects of financial performance required to be better than before the era of regional autonomy. The first aspect is that the area is given the authority to take care of local financing with core strengths in the ability of revenue (fiscal decentralization). The second aspect is the management of regional spending, the financial management area should be more accountable and transparent local demand must be more efficient and effective in the management area.

Policy of fiscal decentralization is believed to bring positive influence on economic growth prompting many countries to implement it. Since the regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia enacted, commitment to the implementation of transparency and public accountability began voiced. Public accountability of local government is the provision of information and the disclosure of the activities and financial performance of local governments to the parties concerned. Regional autonomy and fiscal decentralization expects local governments have greater independence in the financial area. Therefore the role of PAD is critical to the region's financial performance.

The results of this study concluded that there are differences in financial performance in local government in the form of fiscal decentralization Barlingmascakeb on before and after the era of regional autonomy, it is seen from the results of the Paired T-Test Sig. 0.001 <0.05. The difference in the performance of this leads to a worse direction, it can be seen from the ratio of fiscal decentralization down from 0.16284 to 0.11820 after the pre-autonomy autonomy while financial performance in the form of financial independence there is no difference. This is evident from the results of the Paired T-Test Sig. 0.094 > 0.05. Assay results obtained OLS regressions with t count the number of Fiscal Decentralization (DF) (-2.485) <- t table (-2.001) and the Sig. DF 0.006 <0.05 we can conclude that fiscal decentralization has a negative effect on economic growth.

Key Words: Autonomy, Financial Performance of local government, Fiscal Decentralization, Financial Independence, Economic Growth

I. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia di awal tahun 1996 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 mendorong keinginan kuat pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Dengan kata lain, penurunan penerimaan Negara secara simultan telah mendorong timbulnya inisiatif pemberian status otonomi kepada daerah otonom sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1974 sebagai sebutan bagi Pemerintah Provinsi/ Kabupaten Kota di era sebelum otonomi daerah.

Pemerintah Indonesia pada Januari 2001 menetapkan penyelenggaraan pemerintahan baru, yaitu awal dilaksanakannya otonomi daerah di seluruh Daerah Tingkat II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) yang menyangkut otonomi daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004.

UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah (Halim, 2008).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang

No. 33 Tahun 2004 akan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan dapat terwujud (Khusaini, 2006).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Dalam penelitian ini, paling tidak ada dua hal penting yang melatarbelakangi keinginan peneliti untuk menggali lebih jauh tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal ini derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian keuangan daerah. Pertama, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah karena sejak bergulirnya otonomi daerah maka daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan PAD. Dalam hal ini ukuran kinerja yang digunakan oleh peneliti adalah derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian keuangan. PAD menjadi salah satu unsur yang digunakan dalam menghitung derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Kedua, adanya *research gap* yang terjadi pada berbagai penelitian terdahulu terutama penelitian yang terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, menampakkkan kesimpulan berbeda dan menyisakan ruang yang cukup untuk menghadirkan penelitian-penelitian lanjutan guna memperkaya konsep desentralisasi fiskal itu sendiri. Pada satu

sisi kebijakan desentralisasi diyakini dapat membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju untuk menerapkannya secara luas sebagaimana yang disimpulkan Malik, dkk (2006) dan Iimi (2005). Namun sebaliknya, pada kasus lainnya konsep desentralisasi justru berdampak negatif sehingga penerapannya justru kurang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, sebagaimana hasil penelitian Zhang dan Zou (1998).

B. TELAAH PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara umum diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 2 tahun 1999 sebagai titik awal pelaksanaan otonomi daerah maka Pemerintahan Pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat. Untuk menjamin proses desentralisasi berlangsung dan berkesinambungan, pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta regulasi pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah No 104 sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 yang berlaku efektif 1 Januari 2001.

2. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya

ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, *positive accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1986) mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditur dengan manajemen dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah.

Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *agent* dan pihak yang lain bertindak sebagai *principal* (Hendriksen dan Breda, 2001). Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Dalam konteks keuangan sektor publik, otonomi daerah berkaitan dengan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat selaku *principal* kepada pemerintah daerah selaku *agent*.

3. *New Public Management*

New Public Management (NPM) merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Munculnya kritik yang keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep *New Public Management*. *New Public Management* telah mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia.

NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan

praktik manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Hughes, 1998).

4. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintahan pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2009).

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial maupun pada proyek-proyek yang merupakan kerja sama antara sektor publik dengan pihak swasta (Bastian, 2006).

5. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system* (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005, pasal 1 ayat (35) mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan diantaranya yaitu rasio desentralisasi dan kemandirian keuangan.

Dalam penulisan ini, istilah yang penulis maksudkan tentang kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat pencapaian dari

suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

Analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam penelitian ini memakai analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrave dan Abdul Halim, diantaranya desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan. Derajat kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan daerah membiayai pengeluarannya sendiri, semakin tinggi derajat kemandirian keuangan menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total pendapatan, menurut hasil penelitian tim fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel 1 (Wulandari, 2001).

Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup

30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001).

b. Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2008).

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2008). Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dapat dilihat pada tabel 2.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}) + \text{Pinjaman}}$$

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002)

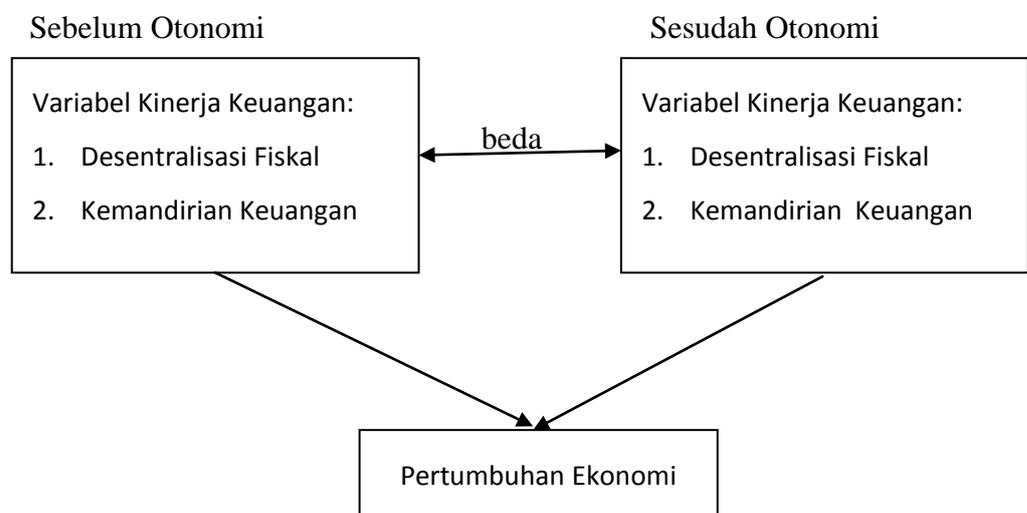
7. Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen : *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu Negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2003), PDB dapat dipandang dalam dua hal. *Pertama*, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. *Kedua*, adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Pada penelitian kali ini, peneliti ingin melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun perbedaan utama penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian kali ini kinerja keuangan diukur dengan rasio keuangan dalam hal ini rasio desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio (Subramanyam, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam model kerangka pemikiran seperti dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang memerlukan pengujian secara empiris.

Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Setelah otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangan sendiri. Kehadiran UU No. 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta

peraturan pelaksanaannya sesudah otonomi daerah adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Dengan ditetapkannya UU ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi sehingga dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian Satya (2008) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemandirian keuangan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Hadirnya otonomi daerah yang dimulai dengan hadirnya UU No. 22 tahun 1999 tentunya membawa konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Sebelum era otonomi daerah, hampir sebagian besar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pemerintah pusat. Dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding era sebelum otonomi daerah. Salah satunya adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan PAD bukan dari bantuan dan pinjaman pemerintah pusat atau provinsi. Kehadiran UU No. 32 tahun 2004 yang berintikan tentang pembagian kewenangan dan fungsi antara pemerintah pusat-daerah dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat dan daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau uang mengikuti kewenangan diharapkan akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah dan tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Hasil penelitian Satya (2008) juga menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk kemandirian keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk kemandirian keuangan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran tentang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Prud'Home seperti dikutip oleh Zulyanto (2010) yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah di masa mendatang. Penelitian Fadjar dan Sembiring (2007) serta Wibowo (2008) menemukan bukti yang cukup untuk menjelaskan hubungan positif pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil studi Malik dkk (2006) tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Pakistan periode 1971-2005 juga menunjukkan hubungan signifikan positif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998) serta Jin dan Zou (2005) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan hasil penelitian Woller dan Philips (1998) yang meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara LDC (Less Develop Country) selama periode 1974-1991 tidak mendapatkan bukti kuat untuk menyatakan adanya pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara LDC tersebut.

Selanjutnya Bahl dan Linn (1992) menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena daerah lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, maka pengeluaran

infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Terlepas dari berbagai silang pendapatan yang ada, argumentasi bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima secara luas. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya praktek desentralisasi fiskal di berbagai negara, termasuk di Indonesia sebagaimana pendapat Mardiasmo (2009) bahwa beranjak dari konsep dasar dan implementasinya dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya ada keyakinan yang kuat dari peminat desentralisasi untuk terus melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Dari pemaparan di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio menurut Musgrave (1991) dan Abdul Halim (2008) seperti tercantum pada tabel 3.

Tabel 3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Desentralisasi fiskal	Ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
2	Kemandirian Keuangan	Ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \dots}$

		kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak	pinjaman
3	Pertumbuhan Ekonomi	Kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara/daerah yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.	$\frac{(PDRBs-PDRBk)}{PDRBk}$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PDRBs = PDRB riil tahun sekarang

PDRBk = PDRB riil tahun kemarin

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2002).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data-data yang relevan dengan penelitian tersebut (Riduan, 2004). Selain itu, dilakukan pula studi pustaka dengan cara mempelajari literatur dan jurnal untuk mendapatkan data lain yang relevan dengan penelitian.

Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2004). Data yang dikumpulkan meliputi data Perhitungan APBD Kabupaten di Barlingmascakeb Anggaran 1995-2007 dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber data diperoleh dari Hasil Laporan Periodik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Biro Pusat Statistik (BPS) serta akses internet di situs www.djpk.depkeu.go.id.

Struktur data dan informasi keuangan yang disajikan untuk periode sebelum dan sesudah otonomi daerah oleh DJPK masih sama, walaupun komponen pembentuk struktur APBD sesudah otonomi daerah telah berganti

nama. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan uji beda terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Struktur Penerimaan Daerah sebelum otonomi terdiri dari:

- a. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
- b. Bagian PAD, yang terdiri dari:
 - 1). Pos pajak daerah
 - 2). Pos retribusi daerah
 - 3). Pos laba BUMD
 - 4). Pos penerimaan dari dinas-dinas
 - 5). Pos penerimaan lain-lain
- c. Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 - 1). Pos bagi hasil pajak
 - 2). Pos bagi hasil bukan pajak
- d. Bagian Sumbangan dan Bantuan
 - 1). Pos sumbangan
 - 2). Pos bantuan
- e. Bagian Penerimaan Pembangunan
 - 1). Pos pinjaman pemerintah daerah
 - 2). Pos pinjaman untuk BUMD

Struktur Penerimaan Daerah sesudah otonomi terdiri dari:

- a. PAD, yang terdiri dari:
 - 1). Pajak daerah
 - 2). Retribusi daerah
 - 3). Bagian laba usaha daerah
 - 4). Lain-lain pendapatan yang sah
- b. Dana Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah
 - 1). Pendapatan bagi hasil pajak bukan pajak
 - 2). Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3). Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Pinjaman Daerah dan Bagian Sisa Perhitungan APBD tahun lalu
- d. Lain-lain penerimaan yang sah

Jenis data adalah data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antar daerah) dan data *time series* (runtun waktu).

Dalam penelitian ini, daerah yang akan dijadikan objek penelitian adalah kabupaten di wilayah Barlingmascakeb. Alasan dipilihnya Barlingmascakeb karena kelima kabupaten tersebut memiliki potensi ekonomi daerah yang hampir sama dan kelima kabupaten tersebut telah membentuk Lembaga Kerjasama Daerah Regional Manajemen Barlingmascakeb yang berorientasi pada regional marketing.

Metode Analisis

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif dan melakukan uji beda atas laporan keuangan kabupaten yang didapat dari Laporan Realisasi APBD. Laporan yang diperbandingkan adalah laporan sejak tahun anggaran 1995/1996 sampai tahun anggaran 2007. Dari laporan keuangan kabupaten ini diambil beberapa rasio yang dianggap cukup memadai dalam menilai kinerja keuangan kabupaten tersebut. Rasio inilah yang dijadikan sebagai alat ukur kinerja keuangan dan diperbandingkan guna mendapatkan hasil apakah terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap Hipotesis 1 dan 2 terlebih dahulu akan dilakukan analisa normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis normalitas ini diperlukan sebagai prasyarat dari uji beda untuk dua sampel berpasangan. Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini akan digunakan uji nonparametric yaitu Kolmogorov-Smirnov.

Untuk meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan analisis regresi dengan data panel. Nama lain dari panel data adalah pool data, kombinasi data *time series* dan *cross section*, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort (Gujarati, 2004). Dengan demikian regresi panel data adalah regresi yang

menggunakan panel data atau pool data yang merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section* (Suliyanto, 2011).

Untuk menguji Hipotesis 3 yaitu pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan analisis regresi dengan data panel, yaitu metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square* = OLS) dengan rumus:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

i = unit cross section

t = periode waktu

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari anggota populasi yang ada sebanyak 5 kabupaten, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam periode sebelum dan sesudah otonomi daerah. Karena data penelitian sudah dipisahkan antara periode sebelum dan sesudah otonomi daerah, maka langkah selanjutnya hanya melakukan perhitungan rasio-rasio tiap anggota populasi untuk tiap periode penelitian yang dijadikan cakupan penelitian. Hasil perhitungan rasio-rasio pada dua periode penelitian dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Rata-rata/Periode

Jenis Kinerja	Rumus Rasio	Sebelum Otonomi	Sesudah Otonomi
Desentralisasi Fiskal	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$	0,16284	0,11820
Kemandirian Keuangan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{pinjaman}}$	0,26308	0,133564

Sumber : Data diolah, 2012

Berdasarkan data yang diperoleh di atas untuk sementara dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah otonomi, namun tidak dapat diketahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Perbedaan kinerja tersebut dapat juga disimpulkan menjadi lebih buruk dari

periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari rasio desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan yang menurun pada saat sesudah otonomi daerah. Namun data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Berikut ini adalah tabel deskriptif statistik yang telah diolah dengan menggunakan SPSS atas setiap rasio kinerja keuangan.

Tabel 5. Deskriptif Statistik

Keterangan	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
DFB	0.1304	0.1974	0.162840	0.0248054
KKB	0.0248	0.4180	0.263080	0.1547763
DFA	0.0996	0.1400	0.118200	0.0170118
KKA	0.1130	0.1549	0.133564	0.0183234

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 6 dapat dilihat nilai tertinggi dan terendah serta standar deviasinya dari setiap rasio pada saat sebelum dan sesudah otonomi daerah. Data ini menggambarkan kinerja keuangan secara rata-rata, baik di titik tertinggi maupun terendahnya. Derajat desentralisasi fiskal sebelum otonomi daerah terendah 0,1304 dan tertinggi 0,1974, serta sesudah otonomi daerah terendah 0,0996 dan tertinggi 0,1400. Hal ini mencerminkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang masih kurang. Demikian pula dengan kemandirian keuangan sebelum otonomi daerah terendah 0,0248 dan tertinggi 0,4180 serta sesudah otonomi daerah terendah 0,1130 dan tertinggi 0,1549. Hal ini berarti hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pada saat sebelum otonomi daerah berpola konsultatif dan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang rendah, sedangkan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah daerah pada era sesudah otonomi daerah berpola instruktif dan mencerminkan kemampuan keuangan yang rendah sekali.

Hasil Pengujian Hipotesis 1 dan Hipotesis 2

Pengujian H_1 dan H_2 dilakukan dengan Paired T-Test, namun sebelum melakukan pengujian peneliti terlebih dahulu memberikan pengkodean atas variabel maupun rasio yang akan diuji. Adapun kode tersebut antara lain:

- a. DFB = Rasio Desentralisasi Fiskal Sebelum Otonomi
- b. DFA = Rasio Desentralisasi Fiskal Sesudah Otonomi
- c. KKB = Rasio Kemandirian Keuangan Sebelum Otonomi
- d. KKA = Rasio Kemandirian Keuangan Sesudah Otonomi

Setelah dilakukan pengkodean, maka data di atas diuji tingkat normalitasnya terlebih dahulu dengan pendekatan Kolmogorov-Smirnov sebelum diuji dengan Paired T-test, dan hasilnya seperti yang tercantum pada tabel 6 dan tabel 7.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk Desentralisasi Fiskal

Keterangan	DFB	DFA
Kolmogorov-Smirnov	0,424	0,428
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,994	0,993

Sumber : Data sekunder diolah

Tabel 7. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk Kemandirian Keuangan

Keterangan	KKB	KKA
Kolmogorov-Smirnov	0,388	0,453
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,998	0,987

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas ke dua variabel yang akan diteliti pada tabel 6 dan tabel 7 terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) di atas 0,05 yaitu untuk DFB = 0,994 > 0,05; DFA = 0,993 > 0,05; KKB = 0,998 > 0,05; KKA = 0,987 > 0,05, ini berarti data dianggap normal secara statistik.

Setelah melakukan uji normalitas terhadap dua variabel tersebut dan ternyata hasilnya layak untuk diteliti, maka data tersebut diolah menggunakan SPSS dengan Paired T-Test, adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pengujian Paired T-Test dan Kesimpulan Atas Uji Hipotesis 1 dan 2

Kode Rasio	Rumus Rasio	Periode Penelitian	Uji T		Keputusan Penelitian
			Sig. (2-tailed)	T value	
DFB DFA	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$	Sebelum Sesudah	0.010	4,634	Terima H ₁
KKB KKA	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi + pinjaman}}$	Sebelum Sesudah	0.165	1,698	Tolak H ₂

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil pengujian dengan Paired T-Test pada tabel 8, untuk desentralisasi fiskal didapat angka t hitung $>$ t tabel yaitu $4,634 > 2,776$ dan nilai Sig. (2-tailed) $0,01 < 0,05$ maka H₁ diterima dan berarti bahwa ada perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk desentralisasi fiskal antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Untuk kemandirian keuangan didapat angka t hitung $<$ t tabel yaitu $1,698 < 2,776$ dan nilai Sig. (2-tailed) $0,165 > 0,05$ maka H₂ ditolak dan berarti tidak ada perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk kemandirian keuangan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis 3

Pengujian H₃ dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dengan data panel, yaitu metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square = OLS), tetapi sebelum diuji dengan metode OLS, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik

Tabel 9. Hasil Pengujian dengan OLS

Keterangan	Sig.	t value
DF	0,006	-2,825

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 terlihat bahwa t hitung Desentralisasi Fiskal (DF) $(-2,485) < -t$ tabel $(-2,001)$ dan nilai Sig. DF

$0,006 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis statistik di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada pemerintah daerah di Barlingmascakeb dalam bentuk desentralisasi fiskal pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah. Perbedaan kinerja ini mengarah ke arah yang lebih buruk, ini dapat dilihat dari rasio desentralisasi fiskal yang turun dari 0,16284 sebelum otonomi menjadi 0,11820 sesudah otonomi. Pendapatan daerah di Barlingmascakeb selama pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari selain PAD, hasil ini terlihat dari menurunnya derajat desentralisasi fiskal. Ketergantungan ini sebagai konsekuensi dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber PAD ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum mampu mendorong daerah mengoptimalkan semua potensinya agar dapat meningkatkan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Satya (2008) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk desentralisasi fiskal antara sebelum dan sesudah otonomi daerah dan perbedaan kinerja ini mengarah ke arah yang lebih buruk.

- b. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada pemerintah daerah di Barlingmascakeb dalam bentuk kemandirian keuangan pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi sebelum dan sesudah otonomi daerah, sebagai konsekuensi

dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber PAD ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Fenomena ini dapat diartikan bahwa belum optimalnya pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang seharusnya cukup kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa, kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan dana daerah. Temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Satya (2008) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk kemandirian keuangan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hal ini dapat disebabkan karena PAD yang berbeda-beda untuk setiap daerah di Indonesia sehubungan dengan potensi sumber daya yang ada di daerahnya.

- c. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal maka akan berpengaruh terhadap semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi ataupun sebaliknya. Hal ini dapat disebabkan karena upaya pelaksanaan desentralisasi fiskal yang utuh di Indonesia baru dilaksanakan secara efektif pada tahun 2001 sejak dikeluarkannya UU No 22 dan 25 tahun 1999. Dengan periode implementasi yang relatif sangat singkat tersebut, nampaknya masih banyak urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat dan berimplikasi pada dominasi anggaran penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah pusat. Padahal transfer ke daerah ini merupakan komponen terbesar dalam penerimaan daerah. Dengan demikian ada kecenderungan derajat desentralisasi fiskal secara umum masih rendah karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi terlihat tinggi. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian dari Zhang dan Zou (1998) serta Jin dan Zou (2005) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

E. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antar PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada pemerintah daerah di Barlingmascakeb dalam bentuk desentralisasi fiskal pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah. Perbedaan kinerja ini mengarah ke arah yang lebih buruk, ini dapat dilihat dari rasio desentralisasi fiskal yang turun dari 0,16284 sebelum otonomi menjadi 0,11820 sesudah otonomi.
3. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada pemerintah daerah di Barlingmascakeb dalam bentuk kemandirian keuangan pada era sebelum dan sesudah otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi sebelum dan sesudah otonomi daerah, sebagai konsekuensi dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber PAD ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
4. Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian dari Zhang dan Zou (1998) serta Jin dan Zou (2005) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implikasi

1. Pemerintah daerah di Barlingmascakeb perlu untuk meningkatkan PAD, karena regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum efektif untuk meningkatkan PAD. Peningkatan PAD bukan berarti pemerintah daerah berlomba-lomba untuk membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
1. Penelitian selanjutnya perlu menambah rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak hanya dari sisi pendapatannya saja tetapi dari sisi pengeluarannya, karena penelitian ini hanya mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan dua rasio, yaitu rasio desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan yang hanya melibatkan elemen-elemen yang ada pada pendapatan/penerimaan daerah saja.
2. Penelitian selanjutnya perlu mencoba menggunakan analisis rasio sektor swasta diterapkan pada sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy W. Dan Johannes Linn, 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*, New York Oxford University Press.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Fadjar A. D dan Britany Alasen Sembiring, 2007. "Efektifitas Faktor Input dan Ketimpangan Pendapatan Daerah di Indonesia setelah Desentralisasi Fiskal". *Wibiz Economic Research Centre*.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta
- Gujarati, N Damodar, 2004. *Basic Econometrics*, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hendriksen, Ross L dan Zimmerman, Jerold L. , 1986. *Positive Accounting Theory*, Prentice-Hall Inc

- Hughes, O. E, 1998. *Public Management and Administration*, 2nd Edition, Mac Millan Press Ltd, London
- Imi, Atsushi, 2005. "Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note", *Journal of Urban Economics* 57
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Jensen, M dan Mecling, W., 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-306
- Jin, Jing dan Zou, Heng-fu, 2005. "Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China, *Journal of Asian Economics*, Elsevier, Vol. 16
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw, Malang
- Mahmudi, 2003. "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik", *Sinergi Kajian Bisnis & Manajemen*, Vol. 6 No. 1
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, UII Press, Yogyakarta
- Malik, Shahnawaz, dkk, 2006. "Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan", *The Pakistan Development Review*, 45: 4 Part ii
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Musgrave, R.A dan Musgrave, P.B, 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*
- Riduan, 2004. *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung

- Santosa, Singgih, 2002, *SPSS Versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Satya, Karya, 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dan setelah Otonomi Daerah", *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara
- Subramanyam, K.R dan John J. Wild, 2010. *Analisis Laporan Keuangan: Financial Statement Analysis*, Edisi 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Wibowo, Puji, 2008. "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah", *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1
- Wulandari, Anita, 2001. "Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi dalam Melaksanakan Otonomi Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, Vol. 5 No. 2, November
- Woller, M Gary dan Phillips Kers, 1998. "Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investigation", *The Journal of Development Studies*, April
- Zhang Tao dan Zou Heng Fu, 1998. "Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China", *Journal of Public Expenditure* 67
- Zulyanto, Aan, 2010. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu", *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

